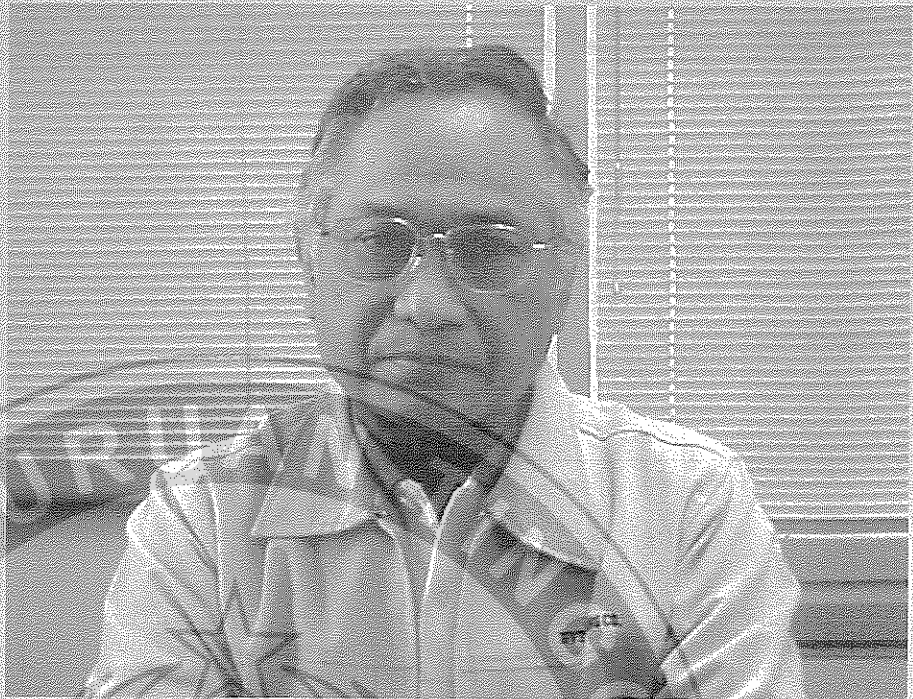


Tanggung jawab sosial perusahaan diperlukan untuk membantu mengatasi masalah sosial di masyarakat. Pemerintah saat ini tengah menggodok membuat payung hukum tanggung jawab sosial perusahaan atau yang dikenal sebagai *corporate social responsibility* (CSR). Aplikasi tanggung jawab sosial perusahaan ini tentunya tidak terlepas dari kebutuhan perusahaan akan rasa aman dan kepastian hukum dalam berusaha. Secara tidak langsung aplikasi CSR tentunya berkait dengan dinamika sosial masyarakat yang menghasilkan social risk bagi perusahaan. *Security Journal* menemui Djimanto, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia, di kediamannya yang asri di kawasan Petukangan untuk membicarakan masalah penerapan CSR yang berkaitan dengan *asset protection* dan reduksi *social risk* bagi kalangan pengusaha.



SECURITY JOURNAL/Agenda

Djimanto
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia

CSR TERGANGGU BANYAK KEPENTINGAN

Menurut Anda, bagaimana sebenarnya bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada masyarakat?

Berdasarkan pengalaman praktis saya, *corporate responsibility* itu ada tiga. *Pertama*, CPR (*corporate public responsibility*) yang berbentuk kewajiban perusahaan terhadap publik seperti pembayaran pajak. Otoritas publik akan mengalokasikan dananya untuk pembangunan. *Kedua*, CER (*Corporate Ecological Responsibility*) yakni tanggung jawab ekologi terhadap pelestarian lingkungan, hutan, dan air. *Ketiga*, CSR (*Corporate Social Responsibility*) yakni tanggung jawab sosial ke-masyarakat-sebagai-subyek. Tujuan tanggung jawab sosial atau CSR itu adalah *harmonious relation between corporate and community*. Dulu namanya *community development*. *Harmonious relation* akan menghasilkan *security* baik dari perspektif *corporate* ataupun masyarakat. Kalau dari perspektif *corporate* akan diterapkan menjadi *corporate security policy*. Sepengetahuan saya, perusahaan yang peduli dengan masyarakat dan lingkungan rata-rata terselamatkan dari kerusuhan Mei 1998. Sampai sekarang juga, perusahaan yang memiliki *harmonious*

relationship dengan masyarakat secara otomatis memiliki perlindungan alamiah bagi perusahaan karena masyarakat tidak menganggap perusahaan sebagai ancaman tetapi bagian dari lingkungannya.

Ada contoh atau model bentuk *harmonious relationship* antara pengusaha dengan masyarakat?

Kalau pengalaman saya, perusahaan saya tidak membangun asrama bagi karyawan di Serang. Buruh-buruh saya biarkan kos di perumahan masyarakat, supaya warga mendapat rezeki. Saya juga memilih tidak melaksanakan Perda di Serang yang mewajibkan setiap perusahaan membangun tempat ibadah di dalam lingkungan perusahaan. Saya memilih untuk membantu pemeliharaan dan pengembangan mesjid di sekitar pabrik, sehingga buruh-buruh saya kalau mau sholat Jum'at pergi ke mesjid sekitar supaya

mereka berinteraksi dengan masyarakat. Itu pengalaman saya.

Akan tetapi, kondisi sosial tahun 1998 berbeda dengan saat ini. Perubahan dinamikanya tentunya memberikan tantangan sendiri bagi pengusaha sekarang. Apa tantangan terbesar kondisi saat ini?

Saat ini tantangan yang dihadapi adalah sering kali program CSR terganggu kepentingan jangka pendek melalui *Law and Regulation*. Misalnya, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas pasal 74 yang mencantumkan perusahaan harus mengalokasikan dana untuk CSR. Kebijakan itu ujungnya akan melahirkan pungutan ke publik yang belum tentu dinikmati masyarakat yang hidup di sekitar lokasi perusahaan. Padahal, perusahaannya sudah bayar pajak dan iuran wajib lainnya. Oleh karena itu kami tidak setuju pasal

tersebut. CSR ini tujuannya menghasilkan *harmonious relation* yang horisontal bukan konflik horisontal.

Perusahaan multinasional tentunya sudah memiliki program CSR untuk diterapkan di seluruh cabangnya. Kalau di Indonesia, apakah penerapannya harus secara nasional atau cukup di masyarakat sekitar lingkungannya saja?

CSR adalah pengembangan *community development*. Makna *community* ada dua, pertama yang sifatnya geografis, berkaitan dengan teritorial tempat kerja. Makna kedua adalah fungsional seperti bantuan bagi bencana alam. Fungsional ini tidak terikat letak geografis, jadi tidak hanya sekitar lokasi pabrik.

Akses informasi dan politik masyarakat saat ini sangat terbuka. Apa dinamika yang dihadapi pengusaha dalam aplikasi CSR?

Pihak yang mengerti rekayasa sosial atau *social engineering* sebenarnya adalah otoritas publik. Sayangnya, kenapa mereka membuat *indate* kelompok-Red yang kemudian menimbulkan kecurigaan dan *social jealousy*. Kalau kita tidak mengikuti aturan Perda dikenakan pungutan. Padahal regulasinya yang mengganggu pelaksanaan CSR. *Risk* yang muncul kemudian lebih diakibatkan masyarakat tidak mengerti CSR itu apa, sehingga cenderung menilai CSR sebagai sumbangan perusahaan ke masyarakat. Pemberian sumbangan berupa uang. Padahal CSR tidak begitu. Kita membangun dan memelihara mesjid, gorong-gorong, dan mengirimkan bantuan korban bencana alam sudah merupakan bentuk CSR.

Pengembangan program tanggung jawab sosial perusahaan sebaiknya dinilai pada dinamika apa?

Sebenarnya tanggung jawab sosial perusahaan sudah dilaksanakan sejak lama oleh seluruh entitas bisnis, tetapi namanya baru dikenal sekarang. Penyerahan zakat dan infaq sebenarnya sudah salah satu bentuk CSR, hanya saja tidak ada yang tahu bahwa itu merupakan program CSR. Intinya adalah program yang membantu manusia.

Apakah penyusunan program CSR diawali analisa *social risk*?

CSR tujuannya adalah menurunkan risiko konflik horisontal. Ini sudah termasuk *risk management*, walaupun tidak pernah diformalkan di seluruh perusahaan. Analisa *risk* biasanya dibuat sendiri dengan data hasil survei yang dinamis dan *updated*.

Apakah *social risk* di Indonesia tinggi atau rendah bagi investor?

Linggi, apalagi *law enforcement* masih

lemah. Dampaknya adalah anggaran untuk CSR semakin tinggi. Bayangkan, pengusaha sudah bayar pajak, sudah membantu perawatan *public service*, tetapi ketika kami menanyakan infrastruktur jalan lingkungan kenapa tidak ada responsnya? Pemerintah biasanya hanya membangun jalan utama, sedangkan jalan lingkungan tidak dibangun dengan harapan perusahaan yang menyediakan jalan lingkungan. Ini sulit, padahal pengusaha harus menjaga *harmonious relationship* dengan masyarakat sekitar.

Apakah jenis *social risk* yang teridentifikasi oleh kalangan pengusaha?

Pertama, kecemburuan antara orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan dengan warga di luar tempat kerja. Warga memandang perusahaan dan orang-orangnya sebagai orang asing yang

CSR tujuannya adalah menurunkan resiko konflik horisontal. Ini sudah termasuk *risk management*, walaupun tidak pernah diformalkan di seluruh perusahaan. Analisa *risk* biasanya dibuat sendiri dengan data hasil survei yang dinamis dan *updated*.

menumpang di wilayahnya. Efek kecemburuan ini bisa macam-macam, apalagi kalau terjadi ledakan kecemburuan sosial. Misalnya perusahaan kita dilarang aktif atau diusir warga wilayah tersebut. Kalau perusahaan tambang diusir, bagaimana cara pindahannya? Kedua, warga menilai perusahaan yang datang sebagai "mesin-ATM". Ada kegiatan, perayaan, persoalan kecil, datang minta bantuan dana. Padahal semua *cost* yang keluar dihitung sebagai biaya operasional. Ini berkait ke pemahaman warga yang tidak mengerti program CSR. Apalagi nanti kalau CSR resmi menjadi pungutan, wah sudahlah. Tidak akan tercipta *harmonious relationship*.

Apakah pengusaha di Indonesia sudah menjadikan CSR sebagai bagian dari *asset protection*?

Tidak disengajakan seperti itu, walaupun salah satu motivasinya adalah melindungi aset perusahaan dengan menekan potensi konflik horisontal.

Hal yang banyak terjadi, warga lokal menuntut pekerjaan ke perusahaan yang masuk ke

wilayahnya. Apa antisipasi yang disiapkan kalangan pengusaha?

Tuntutan meminta pekerjaan akan selalu ada, tetapi tergantung lapangan kerjanya ada atau tidak. Salah satu program CSR yang kemudian muncul adalah memberdayakan masyarakat sekitar supaya dapat terserap ke industri. Itu tidak mudah. Biasanya terganjal kultur dan *public service* yang tidak efektif. Misalnya di satu wilayah tidak ada sekolah negeri bagi masyarakat. Tidak fair kalau pengusaha didesak membangun sekolah bagi mereka. Kita sudah bayar pajak. Seharusnya sekolah disediakan pemerintah, namun kursus keterampilan lain yang diperlukan warga bisa saja diserahkan ke perusahaan yang ada di wilayah tersebut. Kalau kita yang membangun *public service*, maaf saja, nanti ada indikasi korupsi.

Maksudnya?

Sekarang mayoritas anggaran pendapatan dan belanja pemerintah dialokasikan untuk biaya birokrasi, bukan *public service*. Mayoritas anggaran habis untuk bangun kantor, bayar gaji, beli kendaraan dinas, seragam, surat tugas, dan lainnya. Anggaran *public service* seberapa besar? Akhirnya pajak yang dibayar pengusaha sebagai bagian dari *corporate public responsibility* tidak kena sasaran.

Berapa besar anggaran program CSR yang harus disediakan oleh sebuah perusahaan?

Kita tidak dapat menentukan, tetapi harus sesuai dengan keadaan masyarakat di sekitar lokasi. Kalau perusahaan di daerah *remote* yang jarang penduduknya, biaya CSR kecil. Perusahaan itu akan lebih banyak keluar biaya CER untuk pemeliharaan lingkungan.

Artinya CSR merupakan masalah industri di perkotaan saja?

Tidak juga. Ini berkaitan dengan relasi antar manusia. Sepanjang ada pemukiman di sekitar industri, maka CSR perlu diterapkan.

Sejauh mana dampak aplikasi CSR berpengaruh terhadap citra perusahaan?

Pengaruhnya besar sekali, apalagi sekarang sudah ada internet. *Company image* bisa saja di rusak oleh berbagai kelompok. Ada tuduhan industri sebagai *sweatshop*, perusak lingkungan, dan lainnya. *Customer* kita di luar negeri akan ragu-ragu. Mereka hanya mau bertransaksi dengan perusahaan yang *comply* terhadap program CSR dan persyaratan lainnya. Kalau klien mendapat berita jelek di internet mengenai perusahaan saya, tidak akan ada lagi *order* masuk. Biaya rehabilitasi nama baik perusahaan sangat besar karena memperbaiki *company image*. (AP/Bag)